

POTENSI PENGEMBANGAN INDUSTRI KELAPA SAWIT DI DAERAH RIAU¹

Almasdi Syahza², Rosnita³, Suwondo⁴, Besri Nasrul⁵
Lembaga Penelitian Universitas Riau
Kampus Binawidya km 12,5 Pekanbaru. 28293

Abstrak

Kelapa sawit merupakan salah satu komoditas unggulan Indonesia yang berperan dalam pertumbuhan ekonomi nasional. Kontribusinya cukup besar dalam menghasilkan devisa dan penyerapan tenaga kerja. Perkembangan industri pengolahan CPO dan turunannya di Indonesia selaras dengan pertumbuhan areal perkebunan dan produksi kelapa sawit sebagai sumber bahan baku. Sampai tahun 2011 luas perkebunan kelapa sawit mencapai 2.103.175 ha dengan produksi TBS sebesar 36.809.252 ton. Sementara kapasitas olah pabrik kelapa sawit (PKS) hanya sebesar 30.019.200 ton. Hasil analisis menunjukkan daya dukung wilayah (DDW) sebesar 1,584. Seharusnya setiap TBS harus diolah dalam waktu kurang dari 8 jam atau DDW untuk PKS harus kecil dari 1 (DDW,1). Tingginya produksi perkebunan kelapa sawit di Riau merupakan potensi untuk menambah PKS. Hasil perhitungan berdasarkan perkembangan luas lahan dan produktivitas kebun, daerah Riau masih kekurangan PKS sebanyak 16 unit dengan kapasitas olah 60 ton/jam atau identik dengan 21 unit PKS yang kapasitas 45 ton/jam. Kekurangan PKS tersebut berdampak terhadap harga dan pendapatan petani kelapa sawit di pedesaan. Tingginya kebutuhan PKS di Daerah Riau merupakan peluang bisnis bagi investor untuk mengembangkan PKS dan industri produk turunan dari kelapa sawit.

Katakunci: *industri kelapa sawit, daya dukung wilayah, Investor*

Pendahuluan

Perkembangan sektor pertanian sampai saat ini cukup pesat sekali di Indonesia, terutama subsektor perkebunan yang dikembangkan di wilayah Sumatera dan Kalimantan. Khusus di Provinsi Riau, kelapa sawit merupakan komoditas primadona yang banyak diusahakan oleh masyarakat maupun badan usaha. Berdasarkan data Dinas Perkebunan Provinsi Riau (2011), perkembangan luas areal perkebunan kelapa sawit meningkat secara tajam,

¹ Hasil penelitian MP3EI tahun 2012 di Wilayah Riau

² Almasdi Syahza, Pengajar pada Program Studi Pendidikan Ekonomi, Peneliti senior dan Pengamat Ekonomi Pedesaan di Lembaga Penelitian Universitas Riau.

email: asyahza@yahoo.co.id; blog: <http://almasdi.staff.unri.ac.id>

³ Rosnita, Pengajar pada Program Studi Agribisnis Universitas Riau.

⁴ Suwondo, Pengajar pada Program Studi Pendidikan Biologi Universitas Riau.

⁵ Besri Nasrul, Pengajar pada Program Studi Ilmu Tanah Universitas Riau.

yakni 966.786 ha pada tahun 2001 meningkat menjadi 2.103.175 ha pada tahun 2011. Selama periode tahun 2001-2011 tingkat pertumbuhan rata-rata sebesar 8,09% per tahun, sementara komoditas perkebunan lainnya seperti karet dan kelapa justru mengalami penurunan. Perluasan areal perkebunan diikuti dengan peningkatan produksi berupa tandan buah segar (TBS). Produksi TBS sebesar 36.809.252 ton pada tahun 2011 dengan hasil CPO sebesar 6.293.542 ton yang pertumbuhan rerata per tahun sebesar 13,37%.

Pembangunan perkebunan kelapa sawit bertujuan mengatasi kemiskinan dan keterbelakangan khususnya di daerah pedesaan disamping memperhatikan pemerataan. Pembangunan pertanian yang berbasis perkebunan bertujuan meningkatkan kesejahteraan hidup masyarakat sehingga terjadi suatu perubahan dalam pola hidup masyarakat di sekitarnya, dari sisi perkebunan yang berbasis agribisnis kelapa sawit diharapkan dapat mengurangi ketimpangan pendapatan antar golongan masyarakat maupun antar daerah.

Aktivitas kegiatan perkebunan kelapa sawit tersebut didukung oleh pabrik kelapa sawit (PKS) sebanyak 146 unit yang tersebar tidak merata (terpusat di kawasan perkebunan inti dan plasma) pada berbagai kabupaten/kota di Propinsi Riau. Petani-petani swadaya dengan lahannya yang menyebar terletak jauh dari PKS yang ada menyebabkan rendahnya mutu TBS sampai di pabrik akibat jauhnya jarak antara kebun dengan PKS.

Usahatani perkebunan kelapa sawit di daerah Riau berkembang begitu pesatnya, namun tidak diimbangi oleh perkembangan pembangunan industri pengolahan TBS yakni PKS. Kekurangan kapasitas olah PKS menyebabkan terjadinya penumpukan bahan baku di lokasi perkebunan. Harga TBS ditingkat petani (petani swadaya) sangat ditentukan oleh pedagang pengumpul di tingkat desa, bagi petani yang terlibat dengan aktivitas plasma (yang dibina oleh bapak angkat) mendapat prioritas pengolahan TBS, karena TBS petani plasma dibeli oleh koperasi yang dikelola oleh bapak angkat (perusahaan inti).

Dari apa yang telah diungkapkan, maka pada penelitian ini penulis mengajukan beberapa rumusan masalah sebagai titik awal untuk penelitian, yaitu: 1) Seberapa besar daya dukung wilayah (DDW) terhadap pengembangan industri hilir kelapa sawit? 2) Apakah dengan pengembangan industri

hilir kelapa sawit dapat membuka peluang kerja dan peluang usaha di daerah Riau?. Bertitik tolak dari permasalahan yang diajukan, maka tujuan dilakukan penelitian adalah agar hasil penelitian dapat menjadi acuan bagi pembuat kebijakan dan pelaku agribisnis berbasis kelapa sawit. Hasil penelitian diharapkan mampu memberikan informasi antara lain: 1) kemampuan daya dukung wilayah (DDW) terhadap pengembangan industri hilir kelapa sawit; 2) potensi pengembangan industri hilir kelapa sawit dalam upaya peningkatan kesejahteraan masyarakat melalui kesempatan kerja dan peluang usaha di daerah.

Keutamaan penelitian adalah terjaringnya kawasan pengembangan industri hilir kelapa sawit dalam upaya memacu pertumbuhan ekonomi pedesaan melalui pengembangan produk turunan kelapa sawit. Strategi pengembangan bertujuan untuk menciptakan nilai tambah ekonomi sehingga upaya percepatan pembangunan ekonomi masyarakat dapat ditingkatkan.

Hasil temuan penelitian berguna bagi pelaku agribisnis dan pemerintah sebagai pengambil keputusan sehubungan dengan usaha pengembangan perkebunan kelapa sawit. Diharapkan adanya perbaikan yang berakibat meningkatkan nilai tambah bagi pelaku agribisnis kelapa sawit khususnya petani plasma dan swadaya (masyarakat tempatan) sehingga dapat meningkatkan kesejahteraan masyarakat. Hasil penelitian yang dilakukan dapat memberikan rumusan strategis untuk memanfaatkan sumberdaya lokal melalui pembangunan perkebunan kelapa sawit dan produk turunannya.

Kerangka Teoritis

Hasil penelitian Almasdi Syahza (2005), pembangunan perkebunan kelapa sawit di daerah Riau membawa dampak ganda terhadap ekonomi wilayah, terutama sekali dalam menciptakan kesempatan dan peluang kerja. Pembangunan tersebut telah memberikan tetesan manfaat (*trickle down effect*), sehingga dapat memperluas daya penyebaran (*power of dispersion*) pada masyarakat sekitarnya. Semakin besar perkembangannya, semakin terasa dampaknya terhadap tenaga kerja yang bekerja pada sektor perkebunan dan turunannya. Dampak yang dirasakan dapat dilihat dari peningkatan pendapatan

masyarakat petani yang meningkatkan daya beli masyarakat pedesaan, baik untuk kebutuhan primer maupun sekunder.

Dampak terhadap masyarakat sekitar pengembangan perkebunan kelapa sawit, tercermin dari terciptanya kesempatan kerja dan berusaha bagi masyarakat tempatan, seperti membuka kios makanan dan minuman, jasa transportasi, industri rumah tangga, serta jasa perbankan. Dampak yang terjadi menimbulkan munculnya pasar-pasar tradisional di daerah permukiman dan pedesaan sehingga pendapatan dan tingkat kesejahteraan masyarakat meningkat, yang berpengaruh terhadap meningkatnya pola konsumsi dan pendidikan masyarakat (Almasdi Syahza, 2007a).

Aktivitas pembangunan perkebunan kelapa sawit yang melibatkan banyak tenaga kerja dan investasi yang relatif besar untuk industri hilirnya, diperkirakan menumbuhkan dan menciptakan lapangan kerja serta lapangan berusaha. Melalui aktivitas ekonomi menghasilkan barang dan jasa yang diperlukan selama proses kegiatan perkebunan kelapa sawit dan pembangunan industri hilirnya akan mempunyai keterkaitan ke belakang (*backward linkages*). Pada proses kegiatan ini diperkirakan akan muncul antara lain jasa konstruksi, jasa buruh tani, jasa angkutan, perdagangan pangan dan sandang, perdagangan peralatan kerja serta bahan dan material yang dibutuhkan selama proses tersebut. Sedangkan pada kegiatan pasca panen dan proses produksi akan mempunyai keterkaitan ke depan (*forward linkages*). Proses *forward linkages* yang diperkirakan akan muncul adalah sektor jasa, antara lain angkutan, perhotelan, koperasi, perbankan, dan perdagangan (Almasdi Syahza, 2007b). Sebenarnya daerah Riau memiliki potensi besar untuk mengembangkan produk turunan dari kelapa sawit (industri hilir). Industri hilir kelapa sawit ke depan dapat menjadi satu komoditas unggulan perkebunan yang strategis dan diprioritaskan (Riau Terkini, 2006). Namun sampai saat ini industri hilir itu juga belum terwujud.

Pengembangan perkebunan di pedesaan telah membuka peluang kerja bagi masyarakat yang mampu untuk menerima peluang tersebut. Dengan adanya perusahaan perkebunan, mata pencaharian masyarakat tempatan tidak lagi terbatas pada sektor primer, tetapi telah memperluas ruang gerak usahanya pada sektor tertier. Berbagai sumber pendapatan yang

memberikan andil yaitu pedagang (dagang barang-barang harian, dagang karet, tiket angkutan dan penjual es), pegawai (guru, pemerintahan desa), industri rumah tangga (industri tahu, roti, dan percetakan genteng), buruh kasar, nelayan, pencari kayu di hutan dan tukang kayu (Almasdi Syahza, 2009a).

Bagi masyarakat di daerah pedesaan, sampai saat ini usaha perkebunan merupakan alternatif untuk merubah perekonomian keluarga, karena itu animo masyarakat terhadap pembangunan perkebunan masih tinggi. Usahatani kelapa sawit memperlihatkan adanya peningkatan kesejahteraan petani di pedesaan. Kegiatan pembangunan perkebunan telah menimbulkan mobilitas penduduk yang tinggi. Menurut Otto Soemarwoto (2001), bertambahnya jumlah penduduk menyebabkan luas lahan garapan cenderung makin kecil, keadaan ini menyebabkan meningkatnya tekanan penduduk terhadap lahan. Kemudian di daerah perladang berpindah kenaikan kepadatan penduduk juga meningkatkan tekanan penduduk terhadap lahan karena naiknya kebutuhan akan pangan akibatnya diperpendeknya masa istirahat lahan. Selanjutnya, Mustari dan Mapangaja (2005), menyatakan bahwa meningkatnya kepadatan penduduk daya dukung lahan pada akhirnya akan terlampaui. Hal ini menunjukkan bahwa lahan di suatu wilayah tidak mampu lagi mendukung jumlah penduduk di atas pada tingkat kesejahteraan tertentu.

Hasil penelitian Almasdi Syahza (2010), pembangunan perkebunan kelapa sawit di daerah Riau telah memberikan dampak terhadap aktivitas ekonomi pedesaan, dimana pendapatan petani berkisar antara UD\$ 4.633,37- UD\$ 5.500,32 per tahun. Selain itu, juga memberikan dampak terhadap percepatan pembangunan ekonomi masyarakat dalam upaya menegatkan kemiskinan di pedesaan. Dampak aktivitas tersebut terlihat dari indikator: 1) Usahatani kelapa sawit telah dapat mengurangi ketimpangan pendapatan di daerah pedesaan; 2) Tekanan penduduk tanpa subsektor perkebunan sudah melebihi kapasitas kemampuan lahan (>1) yakni sebesar 6,01 tahun 2004 meningkat menjadi 11,04 pada tahun 2008; 3) Daya dukung lahan (DDL) daerah Riau sangat tinggi sekali, pada tahun 2004 sebesar 129,3 dan pada tahun 2008 meningkat menjadi 138,77; 4) Meningkatnya jumlah penduduk dalam batas-batas geografis telah menimbulkan tekanan yang berat terhadap sumberdaya lahan yang tersedia; 5) Meningkatkan jumlah uang beredar di

daerah-daerah pedesaan. Kondisi ini menuntut kebutuhan masyarakat untuk berdirinya kelembagaan yang menangani kebutuhan suatu kelompok masyarakat; 6) Memberikan pengaruh eksternal yang bersifat positif atau bermanfaat bagi wilayah sekitarnya. Manfaatnya terhadap aspek sosial ekonomi antara lain adalah peningkatan kesejahteraan masyarakat sekitar, memperluas lapangan kerja dan kesempatan berusaha, dan memberikan kontribusi terhadap pembangunan daerah; 7) Beberapa kegiatan perkebunan kelapa sawit yang secara langsung memberikan pengaruh terhadap komponen sosial ekonomi dan budaya masyarakat sekitar antara lain: a) Penyerapan tenaga kerja lokal; b) Kegiatan pembinaan masyarakat pedesaan; c) Pembangunan sarana prasarana yang dapat dimanfaatkan oleh masyarakat setempat, terutama sarana jalan darat; d) Penyuluhan pertanian, kesehatan dan pendidikan; dan e) Pembayaran kewajiban perusahaan terhadap negara (pajak-pajak dan biaya kompensasi lain); dan 8) Pembangunan perkebunan kelapa sawit di daerah Riau dapat mengurangi ketimpangan pendapatan antar golongan masyarakat pedesaan. Pembangunan perkebunan kelapa sawit juga dapat menekan tingkat ketimpangan antar daerah kabupaten/kota di Riau.

Pesatnya perkembangan perkebunan kelapa sawit, menyebabkan daerah-daerah sekitar pembangunan perkebunan muncul pusat-pusat pertumbuhan ekonomi di pedesaan. Kondisi ini menyebabkan meningkatnya daya beli masyarakat pedesaan, terutama terhadap kebutuhan rutin rumah tangga dan kebutuhan sarana produksi perkebunan kelapa sawit. Dari sisi lain pembukaan perkebunan akan membutuhkan lahan, apabila hal ini tidak dikendalikan oleh pembuat kebijakan, maka akan terjadi alih fungsi lahan di daerah pedesaan.

Pembangunan perkebunan kelapa sawit di daerah Riau telah mengurangi ketimpangan pendapatan antar golongan masyarakat pedesaan (Almasdi Syahza, 2004). Kegiatan perkebunan menyebabkan mata pencaharian masyarakat tidak lagi terbatas pada sektor primer dalam memenuhi kebutuhan keluarganya, tetapi telah memperluas ruang gerak usahanya pada sektor tertier (Almasdi Syahza, 2006). Aktivitas perkebunan kelapa sawit merupakan salah satu program yang berhasil dalam pemberdayaan masyarakat pedesaan (Almasdi Syahza, 2007b). Dalam upaya memacu pertumbuhan ekonomi dan meningkatkan *multiplier effect* ekonomi perlu dikembangkan konsep agroestate

berbasis kelapa sawit (Almasdi Syahza, 2005). Usahatani kelapa sawit telah memberikan kontribusi terhadap pengembangan lembaga ekonomi di pedesaan (Almasdi Syahza, 2008). Kelapa sawit telah memberikan dampak terhadap percepatan pertumbuhan ekonomi di pedesaan (Almasdi Syahza, 2009, 2010, dan 2011).

Ketidakberdayaan masyarakat pedesaan salah satunya akibat kebijakan yang *mismatch* di masa lalu, yaitu kebijakan yang melupakan sektor pertanian sebagai dasar keunggulan komparatif maupun kompetitif. Sesungguhnya pemberdayaan ekonomi masyarakat pedesaan bukan hanya bermanfaat bagi masyarakat pedesaan itu sendiri, tetapi juga membangun kekuatan ekonomi Indonesia berdasarkan kepada keunggulan komparatif dan kompetitif yang dimiliki (Yuswar Zainal Basri, 2003).

Ketimpangan pendapatan antara desa dan kota cukup tinggi, karena itu agribisnis adalah solusi untuk mengurangi ketimpangan tersebut. Menurut Lewis dalam Todaro, Michael P (2006), perekonomian yang terbelakang terdiri dari dua sektor, yakni: 1) sektor tradisional, yaitu sektor pedesaan subsisten yang kelebihan penduduk dan ditandai dengan produktivitas marginal tenaga kerja sama dengan nol; 2) sektor industri perkotaan modern yang tingkat produktivitasnya tinggi dan menjadi tempat penampungan tenaga kerja yang ditransfer sedikit demi sedikit dari sektor subsisten. Lewis berasumsi bahwasanya tingkat upah di daerah perkotaan 30 persen lebih tinggi daripada rata-rata pendapatan di daerah pedesaan, kondisi ini memaksa pekerja pindah dari desa-desa kota.

Pembangunan pedesaan harus dapat mengurangi ketimpangan antara desa dan kota. Salah satu konsep yang pernah dikemukakan oleh Friedmann. J dan Mike Douglass dalam Almasdi Syahza (2007b) adalah pengembangan agropolitan. Dalam konsep tersebut dikemukakan bagaimana cara mempercepat pembangunan di pedesaan dengan potensi yang dimiliki oleh desa. Untuk itu hal yang perlu dilakukan adalah: *Pertama*, merubah daerah pedesaan dengan cara memperkenalkan unsur-unsur gaya hidup kota (*urbanism*) yang telah disesuaikan pada lingkungan pedesaan tertentu. Bentuk ini tidak lagi mendorong perpindahan penduduk desa ke kota. Menanam modal di pedesaan merupakan salah satu cara menekan urbanisasi dan merubah

tempat permukiman di desa menjadi suatu bentuk campuran yang dinamakan agropolis atau kota di ladang; *Kedua*, memperluas hubungan sosial di pedesaan sampai keluar batas-batas desanya, sehingga terbentuk suatu ruang sosio-ekonomi dan politik yang lebih luas (*agropolitan district*); *Ketiga*, memperkecil keretakan sosial (*social dislocation*) dalam proses pembangunan, yaitu: memelihara kesatuan keluarga, memperteguh rasa aman, dan memberi kepuasan pribadi dalam membangun masyarakat baru; *Keempat*, menstabilisasikan pendapatan desa dan kota. Memperkecil perbedaannya dengan cara memperbanyak kesempatan kerja yang produktif di pedesaan, khususnya memadukan kegiatan pertanian dengan nonpertanian dalam lingkungan masyarakat yang sama; *Kelima*, menggunakan tenaga kerja yang ada secara lebih efektif dengan mengarahkan pada usaha-usaha pengembangan sumberdaya di tiap-tiap *agropolitan district*, termasuk peningkatan hasil pertanian; *Keenam*, merangkai *agropolitan district* menjadi jaringan regional dengan cara membangun dan memperbaiki sarana hubungan antara *agropolitan district* dengan kota; *Ketujuh*, menyusun suatu pemerintahan dan perencanaan yang sesuai dengan lingkungan, sehingga dapat mengendalikan pemberian prioritas pembangunan serta pelaksanaannya pada penduduk daerahnya; *Kedelapan*, menyediakan sumber-sumber keuangan untuk membangun agropolitan.

Menurut Ginanjar Kartasasmita (1996), pembangunan pedesaan harus dilakukan dengan pendekatan yang sesuai dengan sifat dan cirinya. Pembangunan pedesaan harus mengikuti empat upaya besar, satu sama lain saling berkaitan dan merupakan strategi pokok pembangunan pedesaan, yaitu: *Pertama*, memberdayakan ekonomi masyarakat desa. Dalam upaya ini diperlukan masukan modal dan bimbingan-bimbingan pemanfaatan teknologi dan pemasaran untuk memampukan dan memandirikan masyarakat desa; *Kedua*, meningkatkan kualitas sumberdaya manusia pedesaan agar memiliki dasar yang memadai untuk meningkatkan dan memperkuat produktivitas dan daya saing; *Ketiga*, pembangunan prasarana di pedesaan. Untuk daerah pedesaan prasarana perhubungan merupakan kebutuhan yang mutlak, karena prasarana perhubungan akan memacu ketertinggalan masyarakat pedesaan; dan *keempat*, membangun kelembagaan pedesaan baik yang bersifat formal

maupun nonformal. Kelembagaan yang dibutuhkan oleh pedesaan adalah terciptanya pelayanan yang baik terutama untuk memacu perekonomian pedesaan seperti lembaga keuangan.

Bagi pemerintah Indonesia, pembangunan pedesaan selama ini mengacu kepada pembangunan sektor pertanian dan kemudian dikembangkan dalam bentuk agribisnis. Pembangunan pertanian yang dikembangkan dalam bentuk skala besar selama ini adalah subsektor perkebunan yang menjadi komoditi unggulan ekspor, antara lain; kelapa sawit, karet, gambir, kelapa. Bustanul Arifin (2001) menyatakan, pengembangan sektor pertanian dalam arti luas harus diarahkan kepada sistem agribisnis dan agroindustri, karena pendekatan ini akan dapat meningkatkan nilai tambah sektor pertanian, pada hakekatnya dapat meningkatkan pendapatan bagi pelaku-pelaku agribisnis dan agroindustri di daerah.

Peranan agribisnis dalam perekonomian Indonesia sangat penting, dan bahkan derajat kepentingannya diduga akan semakin meningkat, terutama setelah sektor industri pertambangan dan minyak bumi mengalami penurunan produksi yang sangat mengkhawatirkan. Penggerakan sektor agribisnis memerlukan kerjasama berbagai pihak terkait, yakni pemerintah, swasta, petani, maupun perbankan, agar sektor ini mampu memberikan sumbangan terhadap devisa negara. Kebijakan dalam hal peningkatan investasi harus didukung oleh penciptaan iklim investasi Indonesia yang kondusif, termasuk juga dalam birokrasi, akses kredit, serta peninjauan peraturan perpajakan dan tarif pajak untuk sektor agribisnis (Gumbira Sa'id, E. dan L. Febriyanti, 2005).

Pengembangan sektor pertanian dalam arti luas harus diarahkan kepada sistem agribisnis dan agroindustri, karena pendekatan ini akan dapat meningkatkan nilai tambah sektor pertanian, pada hakekatnya dapat meningkatkan pendapatan bagi pelaku-pelaku agribisnis dan agroindustri di daerah. Hasil penelitian Almasdi Syahza (2005), faktor lain yang mendukung prospek pengembangan agribisnis untuk masa datang, antara lain: 1) penduduk yang semakin bertambah sehingga kebutuhan pangan juga bertambah, ini merupakan peluang pasar yang baik bagi pelaku agribisnis; 2) meningkatnya pendapatan masyarakat akan meningkatkan kebutuhan pangan berkualitas dan beragam (diversifikasi). Keragaman produk menuntut adanya pengolahan hasil

(agroindustri); dan 3) perkembangan agribisnis juga akan berdampak terhadap pertumbuhan ekonomi suatu daerah, meningkatkan pendapatan petani yang pada akhirnya diharapkan akan mengurangi ketimpangan pendapatan masyarakat.

Dalam pengembangan sektor pertanian ke depan masih ditemui beberapa kendala, terutama dalam pengembangan sistem pertanian yang berbasis agribisnis dan agroindustri. Kendala yang dihadapi dalam pengembangan pertanian khususnya petani skala kecil, antara lain (Almasdi Syahza, 2007a): 1) lemahnya struktur permodalan dan akses terhadap sumber permodalan, 2), ketersediaan lahan dan masalah kesuburan tanah, 3) pengadaan dan penyaluran sarana produksi, 4) terbatasnya kemampuan dalam penguasaan teknologi, 5) lemahnya organisasi dan manajemen usahatani, dan 6) kurangnya kuantitas dan kualitas sumberdaya manusia untuk sektor agribisnis. Petani merupakan sumberdaya manusia yang memegang peranan penting dalam menentukan keberhasilan suatu kegiatan usahatani, karena petani merupakan pekerja dan sekaligus manajer dalam usahatani itu sendiri.

Metode Penelitian

Penelitian ini dilakukan melalui survey dengan metode perkembangan (*Developmental Research*). Tujuan penelitian perkembangan adalah untuk menyelidiki pola dan perurutan pertumbuhan atau perubahan sebagai fungsi waktu. Lokasi penelitian di daerah yang berpotensi pengembangan perkebunan kelapa sawit, baik melalui badan usaha milik negara (BUMN) dan badan usaha milik swasta (BUMS) maupun secara swadaya oleh masyarakat. Lokasi penelitian akan dibagi menjadi dua bagian yakni bagian wilayah daratan dan wilayah pesisir. Wilayah Riau daratan yakni Kabupaten Kampar, Rokan Hulu, dan Kuantan Singingi, sedangkan wilayah Riau pesisir yakni Kabupaten Pelalawan, Siak, Bengkalis, Indragiri Hilir, Indragiri Hulu, dan Rokan Hilir. Kedua wilayah penelitian tersebut mempunyai produktifitas berbeda yang disebabkan perbedaan tingkat kesuburan tanah.

Data yang diperlukan adalah data primer dan sekunder. Data sekunder diperoleh dari instansi terkait maupun dari perusahaan kelapa sawit. Informasi

yang diperlukan berupa kebijakan oleh pemerintah daerah dan perusahaan perkebunan. Data primer dilakukan dengan menggunakan daftar pertanyaan yang telah disusun berdasarkan kebutuhan penelitian. Untuk mendapatkan informasi yang akurat dilakukan dengan metode *Rapid Rural Appraisal* (RRA), yaitu suatu pendekatan partisipatif untuk mendapatkan data/informasi dan penilaian (*assesment*) secara umum di lapangan dalam waktu yang relatif pendek. Dalam metode RRA ini informasi yang dikumpulkan terbatas pada informasi sesuai dengan tujuan penelitian, namun dilakukan dengan lebih mendalam dengan menelusuri sumber informasi sehingga didapatkan informasi yang lengkap tentang sesuatu hal.

Untuk mendapatkan hasil penelitian guna mendapat informasi yang akurat terhadap potensi pengembangan ekonomi kelapa sawit melalui pengembangan industri hilir berbasis kelapa sawit, maka perlu dilakukan beberapa analisis, antara lain: 1) Kemampuan daya dukung wilayah (DDW); 2) Potensi pengembangan industri hilir kelapa sawit; 3) Kesempatan peluang kerja dan usaha di daerah kajian; 4) Terjaringnya sentra produksi dan kawasan pembangunan industri hilir berbasis kelapa sawit di daerah berpotensi.

Analisis daya dukung wilayah (DDW) dilakukan untuk mengetahui kemampuan Daerah Riau dalam menyediakan bahan baku untuk industri kelapa sawit (TBS). Untuk mengetahui DDW tersebut digunakan data produksi kelapa sawit dan jumlah kebutuhan bahan baku untuk industri hilir kelapa sawit (PKS). Secara matematis daya dukung wilayah terhadap industri kelapa sawit adalah:

$$DDW = \frac{L_i \times P_i}{KBB}$$

Keterangan: DDW merupakan daya dukung wilayah dalam pengembangan industri hilir kelapa sawit, L_i adalah luas kebun kelapa sawit di Daerah Riau, P_i adalah produktivitas kebun kelapa sawit per hektar, dan KBB merupakan kebutuhan bahan baku industri kelapa sawit dalam bentuk TBS.

Apabila hasil perhitungan menunjukkan rasionya > 1 , maka daya dukung wilayah dalam pengembangan industri hilir kelapa sawit cukup kuat, dan sebaliknya apabila rasionya < 1 , daya dukung wilayah sangat lemah.

Untuk memperkirakan kapasitas produksi PKS yang dibutuhkan, digunakan asumsi sebagai berikut: 1) pabrik beroperasi 20 jam per hari; 2) satu bulan kalender bekerja 25 hari; 3) produksi TBS berpedoman pada tahun 2011; 4) produksi optimum kebun diasumsikan 22,8 ton/ha/tahun; dan 5) kapasitas PKS 60 ton/jam. Data indikator yang diperlukan adalah ketersediaan bahan baku kelapa sawit yang ada di daerah. Berdasarkan data indikator dan asumsi tersebut di atas, maka dapat diproyeksikan kebutuhan PKS untuk masa akan datang. Kebutuhan kapasitas PKS untuk mengolah TBS dapat dihitung dengan rumus:

$$TKP = \frac{TM \times Pr}{JK \times JH \times 12}$$

Keterangan: TKP adalah total kapasitas pabrik; TM adalah luas tanaman menghasilkan; Pr adalah produktivitas lahan per tahun; JK adalah jam kerja pabrik per hari; dan JH adalah jumlah hari kerja pabrik per bulan.

Hasil dan Pembahasan

A. Perkembangan Industri CPO

Sektor industri minyak kelapa sawit (*Crude Palm Oil/CPO*) Indonesia terus tumbuh pesat dari tahun ke tahun. Produksi CPO meningkat menjadi 21,0 juta ton pada 2010 dari tahun sebelumnya 19,4 juta ton. Pada 2011 ini produksi diperkirakan akan naik 4,7% menjadi sekitar 22,0 juta ton. Sementara itu, total ekspor juga meningkat, pada 2010 tercatat sekitar 15,65 juta ton, kemudian diperkirakan akan melonjak menjadi 18,0 juta ton pada 2011. Sampai saat ini Indonesia masih menempati posisi teratas sebagai negara produsen CPO terbesar dunia, dengan produksi sebesar 21,8 juta ton pada 2010. Dari total produksi tersebut diperkirakan hanya sekitar 25% sekitar 5,45 juta ton yang dikonsumsi oleh pasar domestik. Sebagai penghasil CPO terbesar di dunia, Indonesia terus mengembangkan pasar ekspor baru untuk memasarkan produksinya dan memperbesar pasar yang sudah ada. Misalnya Pakistan, Bangladesh, dan Eropa Timur serta China.

Peningkatan produksi CPO didukung oleh total luas areal perkebunan kelapa sawit yang terus bertambah yaitu menjadi 7,9 juta hektar pada 2011 dari 7,5 juta hektar pada 2010. Saat ini pemerintah menetapkan perbaikan infrastruktur di semua lahan CPO yang ada di Indonesia termasuk lima kluster dasar yang telah disiapkan oleh pemerintah yaitu Pantai Utara Jawa, Pantai Timur Sumatera, Kalimantan Timur, daerah Sulawesi dan Merauke.

Meskipun demikian, Indonesia sebagai produsen terbesar dunia minyak kelapa sawit, sampai saat ini masih mendapatkan nilai tambah terkecil dari produksi minyak kelapa sawit karena sebagian besar minyak sawit masih diekspor dalam bentuk *crude palm oil* (CPO) atau dalam bentuk olahannya yang sederhana seperti minyak goreng. Padahal nilai tambah dari industri hilir CPO ini sangat besar.

Mengingat peranan minyak sawit dalam pasokan minyak konsumsi dunia makin lama makin besar maka peluang pasar bagi CPO dan olahannya makin besar. Demikian juga potensi Indonesia untuk menjadi produsen CPO masih besar karena masih didukung oleh ketersediaan lahan untuk pengembangan. Namun diperlukan upaya untuk mendapatkan nilai tambah yang lebih besar dari minyak kelapa sawit tidak hanya sekedar mengekspor dalam bentuk CPO.

Upaya pengembangan industri pengolahan CPO tidak bisa berjalan begitu saja tanpa dukungan pemerintah karena tuntutan pasar selama ini menyebabkan lebih menguntungkan untuk mengekspor CPO daripada mengolahnya didalam negeri. Selain itu, industri berbasis CPO di Indonesia belum sepenuhnya terintegrasi antara industri hulu dan hilir. Potensi bahan baku yang tinggi sebaiknya dimanfaatkan untuk pengembangan industri hilirnya, karena mempunyai nilai tambah yang tinggi dan menimbulkan efek ganda (*multiplier effect*) yang sangat signifikan.

Dari sisi geografis dan ketenaga kerjaan, Indonesia mempunyai keunggulan yang menjadi potensi untuk mengembangkan perkebunan kelapa sawit maupun industri CPO. Dari sisi daya saing bahan baku, Indonesia mempunyai ketersediaan bahan baku yang tinggi mengingat lahan perkebunan kelapa sawit nasional paling luas di dunia. Disisi lain, Malaysia diperkirakan akan mengalami titik jenuh karena lahan semakin sempit. Rencana perluasan kebun sawit Indonesia diharapkan dapat meningkatkan peran Indonesia dalam

perkelapasawitan dunia. Disisi lain Malaysia sebagai produsen CPO kedua di dunia tidak lagi memiliki lahan pengembangan yang baru, yang ada hanyalah peningkatan produktivitas yang rata-rata 3 %.

Pengembangan turunan minyak sawit di masa yang akan datang mempunyai prospek yang sangat baik. Dalam rangka pengembangannya, perlu didukung oleh seluruh pemangku kepentingan mulaidari budidaya tanaman, proses produksi dan pemasaran. Upaya ini perlu didukung pula oleh lembaga terkait seperti Litbang, SDM, penyedia mesin dan peralatan serta Perbankan/Permodalan. Oleh karena itu, dalam rangka mewujudkan upaya peningkatan produksi CPO serta ekspor produk turunan CPO baik dalam jenis, volume dan nilai ekspor melalui pengembangan industri hilir CPO dan mengisi kekosongan kapasitas produksi industri hilir yang telah ada (*existing industry*) maka perlu disusun roadmap pengembangan klaster industri CPO.

Pemanfaatan CPO untuk produk olahan diantaranya oleh industri pangan dan industri non pangan. Industri pangan misalnya industri minyak goreng, margarin, shortening, cocoa butter substitutes, dan vegetable ghee, sedangkan industri non pangan seperti oleokimia (*fatty acid, fatty alcohol, gliserin*) dan biodiesel. Hingga saat ini terdapat sekitar 23 jenis produk turunan CPO yang telah diproduksi di Indonesia. Kondisi Industri Inti, Pendukung dan industri yang terkait dengan CPO adalah, antara lain:

- 1) Industri Inti yang sudah berkembang yaitu industri CPO dan industri minyak inti sawit (PKO)
- 2) Industri Terkait yang sudah mulai berkembang antara lain turunan CPO: *Stearine, RBD PO, RBD Palm Olein, Margarine, Shortening, RBD Palm Stearine, CBS/CBE, Creaming Fats, Vegetable Ghee*. Demikian juga industri terkait dari inti sawit antara lain *Fatty Alkohol dan Fatty Acid*.
- 3) Industri terkait yang belum berkembang adalah *Palm Kernel Cake, Crude Palm Fatty Acid, RBD Palm Kernel Stearin, Metallic Salt, Polyetoxylat Derivatives, Fatty Amines, Fatty Amida, Soaps, Pakan Ternak, Gliserol, Gliserine*.
- 4) Industri Pendukung yang sudah berkembang adalah industri mesin peralatan PKS, industri mesin peralatan minyak goreng sawit, tangki timbun, pipanisasi, industri kemasan, lembaga penelitian PPKS.

- 5) Industri pendukung yang belum berkembang adalah industri mesin peralatan turunan CPO, industri Fine chemicals, Industri Asam Phospat, usaha pembibitan, lembaga penelitian, dan lain sebagainya.

Kelompok Industri Hulu

Kelapa sawit merupakan salah satu komoditas unggulan Indonesia yang berperan dalam pertumbuhan ekonomi nasional, dengan kontribusinya yang cukup besar dalam menghasilkan devisa dan penyerapan tenaga kerja. Perkembangan industri pengolahan CPO dan turunannya di Indonesia adalah selaras dengan pertumbuhan areal perkebunan dan produksi kelapa sawit sebagai sumber bahan baku.

Perkebunan kelapa sawit menghasilkan buah kelapa sawit / tandan buah segar (hulu) kemudian diolah menjadi minyak sawit mentah (hilir perkebunan sawit dan hulu bagi industri yang berbasiskan CPO). Disamping menghasilkan produk CPO, pengolahan tandan buah segar (TBS) juga menghasilkan produk PKO (Palm Kernel Oil). Produksi PKO meningkat seiring dengan meningkatnya produk CPO, yakni sekitar 20% dari CPO yang dihasilkan.

Kelompok Industri Antara

Dari minyak kelapa sawit (CPO) dan minyak inti sawit (PKO) dapat diproduksi berbagai jenis produk antara sawit yang digunakan sebagai bahan baku bagi industri hilirnya baik untuk kategori pangan ataupun non pangan. Diantara kelompok industri antara sawit termasuk didalamnya industri olein, stearin, oleokimia dasar (fatty acid, fatty alcohol, fatty amines, methyl ester, glycerol).

Kelompok Industri Hilir

Dari produk antara sawit dapat diproduksi berbagai jenis produk yang sebagian besar adalah produk yang memiliki pangsa pasar potensial, baik untuk pangsa pasar dalam negeri maupun pangsa pasar ekspor. Pengembangan industri hilir sawit perlu dilakukan mengingat nilai tambah produk hilir sawit yang tinggi. Jenis industri hilir kelapa sawit spektrumnya sangat luas, hingga lebih dari 100 produk hilir yang telah dapat dihasilkan pada

skala industri. Namun baru sekitar 23 jenis produk hilir (pangan dan non pangan) yang sudah diproduksi secara komersial di Indonesia.

Beberapa produk hilir turunan CPO dan PKO yang telah diproduksi diantaranya untuk kategori pangan: minyak goreng, minyak salad, shortening, margarine, Cocoa Butter Substitute (CBS), vanaspati, vegetable ghee, food emulsifier, fat powder, dan es krim. Adapun untuk kategori non pangan diantaranya adalah : surfaktan, biodiesel, dan oleokimia turunan lainnya.

Kapasitas terpasang industri oleokimia dasar dunia jauh lebih besar dari kebutuhan oleokimia dunia. Namun permintaan dunia akan produk oleokimia terus meningkat dari tahun ke tahun. Kenaikan permintaan oleokimia dunia dengan laju rata-rata sekitar 5% pertahun.

B. Kemampuan Daya Dukung Wilayah (DDW) Terhadap Pengembangan Industri Hilir Kelapa Sawit

Tingginya minat masyarakat pedesaan di Daerah Riau terhadap usahatani kelapa sawit telah menjadikan Daerah Riau sebagai penghasil kelapa sawit terluas di Indonesia. Luas perkebunan kelapa sawit berdasarkan data tahun 2011 telah mencapai 2.085.068 ha (belum termasuk tanaman rusak) dan produksi tandan buah segar (TBS) sebanyak 36.809.252 ton per tahun dengan produktivitas 22,8 ton per hektar per tahun. Berdasarkan kondisi lahan dan tingkat kesuburan tanah di Riau produktivitas CPO sebesar 3,9 ton per hektar per tahun. Sementara itu jumlah pabrik kelapa sawit di Riau sebanyak 146 buah dengan kapasitas produksi sebesar 6.254 ton per jam yang tersebar di beberapa kabupaten. Distribusi produksi TBS dan CPO serta penyebaran PKS dengan kapasitasnya disajikan pada Tabel 1.

Tingginya keinginan masyarakat untuk memiliki kebun kelapa sawit, maka luas kebun kelapa sawit di masa datang diprediksi akan selalu bertambah. Seiring dengan pertambahan luas areal akan diikuti dengan peningkatan produksi TBS. Kondisi ini juga akan menyebabkan kapasitas pengolahan TBS semakin dibutuhkan baik dari segi jumlah maupun dari segi kapasitas olahannya. Begitu juga untuk luas yang ada, produksinya akan bertambah karena masih banyaknya tanaman yang belum menghasilkan.

Sampai tahun 2011 luas tanaman yang belum menghasilkan sebanyak 470.713 ha yang tersebar di duabelas daerah kabupaten/kota.

Tabel 1. Produksi TBS, CPO, Produktivitas Lahan Kelapa Sawit dan Kapasitas PKS di Daerah Riau Tahun 2011

Kabupaten/kota		Produksi TBS (ton/thn)	Produksi (ton CPO)	PKS/Kapasitas	
				Unit	Ton/jam
1	Kampar	7.680.797	1.273.944	35	1.425
2	Rokan Hulu	6.150.819	989.041	22	984
3	Pelalawan	3.737.648	648.197	17	715
4	Indragiri Hulu	2.185.196	389.113	8	285
5	Kuantan Singingi	2.392.285	431.385	10	450
6	Bengkalis	2.303.132	435.688	8	350
7	Rokan Hilir	4.639.402	797.644	22	915
8	Dumai	406.727	75.085	1	60
9	Siak	4.035.206	704.027	15	685
10	Indragiri Hilir	3.097.067	518.911	8	385
11	Pekanbaru	180.973	30.507	-	-
12	Kepulauan Meranti	-	-	-	-
Total		36.809.252	6.293.542	146	6.254
Produktivitas lahan		22,80	3,90		

Sumber: Dinas Perkebunan Propinsi Riau, Tahun 2012

Pesatnya perkembangan usahatani kelapa sawit disebabkan karena adanya peluang untuk merubah nasib mereka. Pembangunan perkebunan kelapa sawit telah mampu memberikan kontribusi yang tinggi terhadap pendapatan keluarga. Kegiatan usahatani kelapa sawit telah mampu menciptakan multiplier

effect ekonomi di pedesaan. Jumlah uang beredar meningkat, daya beli masyarakat pedesaan meningkat, dan permintaan terhadap jumlah barang juga meningkat. Akibatnya terjadi mobilitas barang dan orang antara desa dan kota.



Gambar 1. Proses sortiran TBS di salah satu pabrik kelapa sawit di Riau

Dampak dari semua ini akan berlanjut kepada peningkatan usahatani kelapa sawit.

Perkembangan usahatani kelapa sawit berdampak kepada meningkatkan hasil perkebunan kelapa sawit berupa TBS. Dari sisi lain perkembangan pembangunan pabrik pengolah tidak sebanding dengan perkembangan produksi kebun masyarakat. Hal tersebut berdampak terhadap menumpuknya hasil perkebunan (TBS) baik di sekitar kebun masyarakat maupun di PKS. Kondisi ini sangat dirasakan bagi petani nonplasma (petani swadaya). Bahkan TBS yang telah dipanen sering terlambat dibeli oleh toke atau terlambat di olah oleh PKS. Keterlambatan olah ini akan berdampak kepada mutu TBS itu sendiri karena dapat meningkatkan kandungan asam lemaknya. Perkembangan dan tingginya animo masyarakat terhadap usahatani kelapa sawit telah menyebabkan kelebihan bahan baku industri PKS, karena PKS tidak mampu menampung TBS yang sudah kelebihan produksi. Akibatnya perbandingan antara produksi lahan dengan ketersediaan PKS tidak seimbang (DDW lebih besar dari 1). Untuk itu diperlukan analisis daya dukung wilayah (DDW) dalam penyediaan bahan baku PKS.

Hasil analisis perhitungan DDW industri kelapa sawit disajikan pada Tabel 2. Hasil perhitungan didasarkan pada asumsi ketersediaan indikator, antara lain: luas lahan produktif baik menghasilkan maupun yang belum menghasilkan, produktivitas lahan, kapasitas yang sudah



Gambar 2. Antrian truk pengangkut TBS di salah satu pabrik di Riau

terpasang. Berdasarkan asumsi tersebut diperoleh angka indeks DDW sebesar 1,226 (jam operasi PKS 400 jam per bulan dan selama 25 hari kerja per bulan). Hasil perhitungan ini membuktikan bahwa angka DDW lebih besar dari 1, yang berarti daya dukung wilayah Riau terhadap penyediaan bahan baku PKS cukup besar. Setiap satu satuan kemampuan olah PKS didukung oleh bahan baku TBS sebanyak 1,226 satuan. Apabila diasumsikan operasi PKS 500 jam per bulan (20 jam per hari selama 25 hari perbulan) maka DDW sebesar 0.981.

Artinya kapasitas mesin terpasang masih mencukupi untuk pengolahan bahan baku TBS. Namun dari sisi lain kenyataan di lapangan masih ada TBS yang terlambat diolah, hal tersebut lebih disebabkan letak lokasi PKS dan kebun tidak terdistribusi secara merata sesuai dengan kapasitas olah PKS.



Gambar 3. Antrian truk pengangkut TBS di salah satu pabrik di Riau

Untuk masa yang akan datang produksi TBS mengalami peningkatan karena masih ada kebun yang belum menghasilkan. Jika diasumsikan semua kebun baik tanaman belum menghasilkan (TBM) dan tanaman menghasilkan (TM) berproduksi, maka DDW meningkat menjadi 1,584. Perhitungan tersebut diasumsikan jam kerja PKS 400 jam per bulan. Jika diasumsikan jam kerja PKS per bulan 500 jam (20 jam per hari, 25 hari per bulan) maka DDW sebesar 1,267. Angka ini juga membuktikan bahwa bahan baku untuk PKS masih mengalami kelebihan. Untuk lebih jelasnya DDW setiap kabupaten/kota disajikan pada Tabel 2.

Sebagai informasi, dalam ketentuan TBS harus diolah dalam waktu 8 jam setelah panen. Jika TBS tidak diolah dalam waktu tersebut, maka kandungan asam lemak bebasnya akan meningkat dan ini menyebabkan mutu TBS menjadi turun setelah sampai di PKS. Hal tersebut akan berakibat turunnya harga jual oleh petani. Untuk menjaga mutu TBS, maka setiap TBS yang tiba di PKS harus langsung diolah. Artinya DDW tidak boleh lebih besar dari 1 ($DDW < 1$). Apabila ini bisa dilakukan maka kualitas TBS dan kandungan asam lemak bebas dapat ditolerir, dan kandungan CPO dapat ditingkatkan.

Tingginya angka DDW memperlihatkan melimpahnya bahan baku yang tersedia di wilayah Riau. Kelebihan bahan baku ini akan menyebabkan tidak efisiennya proses produksi. Kelebihan bahan baku yang dipasok dari pihak petani akan menyebabkan penurunan harga jual petani. Karena kondisi pasar yang dihadapi oleh pihak petani adalah monopsonistik, maka petani tidak memiliki kekuatan tawar menawar, sehingga petani hanya sebagai penerima harga dari pihak pedagang (kaki tangan PKS). Kondisi ini juga menyebabkan

harga TBS ditingkat petani sangat berfluktuasi, terutama bagi petani swadaya murni.

Tabel 2. Penyebaran PKS dan Hasil Perhitungan Daya Dukung Wilayah (DDW) Terhadap Industri Kelapa Sawit di Daerah Riau Tahun 2012

Kabupaten/kota		Luas Lahan (Tahun 2011)			PKS/ Kapasitas		DDW	
		TM	TBM	Jumlah	Unit	Ton/ jam		
1	Kampar	320.466	33.262	353.728	35	1.425	1,123	
2	Rokan Hulu	254.680	161.756	416.436	22	984	1,302	
3	Pelalawan	161.235	21.600	182.835	17	715	1,089	
4	Indragiri Hulu	98.222	19.993	118.215	8	285	1,597	
5	Kuantan Singingi	105.382	16.189	121.571	10	450	1,108	
6	Bengkalis	108.247	62.619	170.866	8	350	1,371	
7	Rokan Hilir	216.134	19.602	235.736	22	915	1,056	
8	Dumai	20.135	12.281	32.416	1	60	1,412	
9	Siak	182.660	50.048	232.708	15	685	1,227	
10	Indragiri Hilir	139.696	72.781	212.477	8	385	1,676	
11	Pekanbaru	7.498	582	8.080	-	-		
12	Kepulauan Meranti	-	-	-				
Total		1.614.355	470.713	2.085.068	146	6.254	1,226	
Jam kerja 500 jam/bulan (20 jam/hari), 25 hari/bulan								0,981
Termasuk TBM, jika jam kerja 400 jam/bulan								1,584
Termasuk TBM, jika jam kerja 500 jam/bulan								1,267

Hasil perhitungan berdasarkan data yang ada, maka Daerah Riau masih kekurangan PKS untuk masa datang. Prediksi ini didasarkan karena luas kebun kelapa sawit ada kecenderungan meningkat dan masih luasnya tanaman yang belum menghasilkan. Untuk itu ke depan pembangunan pabrik pengolah kelapa sawit (PKS) masih dibutuhkan. Sebagai bahan pertimbangan hasil prediksi PKS untuk masa datang di Riau disajikan pada Tabel 3.

Pertambahan PKS untuk wilayah pedesaan diperlukan sebanyak 16 unit dengan kapasitas olah 60 ton TBS/jam atau identik dengan 21 unit PKS dengan kapasitas olah 45 ton TBS/jam. Apabila jam kerja PKS 500 jam per bulan maka kekurangan PKS sebanyak 19 unit dengan kapasitas olah 60 ton/jam (identik dengan 25 unit PKS dengan kapasitas olah 45 ton TBS/jam). Karena potensi luas lahan masih bertambah dimasa datang dan masih adanya tanaman yang

belum menghasilkan (TBM), maka prediksi kebutuhan PKS untuk mengolah TBS sebesar 41 unit. Namun pembangunan perlu direncanakan dengan baik sesuai dengan penyebaran kebun petani, terutama petani swadaya. Pada aktivitas kelapa sawit jarak dan waktu panen dengan pengolahan di PKS



Gambar 4. Potensi tangki penyimpanan CPO di kawasan Industri Riau

perlu menjadi perhatian. Untuk menjamin kualitas dan rendemen minyak sawit, maka dalam waktu 8 jam TBS sudah diolah di PKS. Karena itu kondisi jalan dan jarak antara kebun dengan PKS menjadi pertimbangan untuk menjamin kualitas. Kelemahan perkebunan petani swadaya adalah kebun mereka tersebar secara tidak merata, sedangkan petani plasma kebun kelapa sawit berada dalam satu kawasan. Sehingga dalam perencanaan pembangunan PKS sangat mudah menentukan lokasi PKS.

Tabel 3. Prediksi Kebutuhan Pabrik Pengolah Kelapa Sawit di Riau

Indikator Perkiraan	Kuantitas
Luas Areal (ha) tahun 2011	2.085.068
Produksi TBS (ton) tahun 2011	36.809.252
PKS sudah ada (unit)	146
Kapasitas PKS terpasang (ton/jam)	6.254
<i>Proyeksi Kebutuhan PKS</i>	
Luas lahan yang ada (ha) tahun 2011	2.085.068
Produksi (ton TBS) tahun 2011	36.809.252
Kapasitas PKS terpasang (ton TBS/jam)	6.254
Kemampuan olah (ton TBS/tahun) tahun 2011	30.019.200
Kelebihan bahan baku (ton TBS)	6.790.052
Kekurangan PKS (60 ton TBS/jam) ¹	16
Kekurangan PKS (60 ton TBS/jam) ²	19
<i>Prediksi jika TM dan TBM diperhitungkan</i>	
Kapasitas olah PKS	30.019.200
Belum terolah (produktivitas 22,8 ton/th)	17.522.309
Kekurangan PKS (60 ton TBS/jam) ¹	41

Catatan: 1) jam kerja 600 jam/bulan, 25 hari/bulan
2) jam kerja 500 jam/bulan, 25 hari/bulan

Implikasi Manajemen

Produk minyak kelapa sawit mempunyai sifat keterkaitan industri ke depan maupun ke belakang yang cukup tinggi. Industri hilir minyak kelapa sawit yang sangat strategis dan menyangkut hajat hidup orang banyak adalah industri minyak goreng. Seharusnya pemerintah menaruh perhatian yang tinggi terhadap struktur pasar domestik minyak goreng. Sebagian besar penduduk Indonesia masih mengharapkan ketersediaan minyak goreng yang cukup sebagai bagian dari ketahanan pangan. Namun serangkaian kebijakan pemerintah masih terlalu memfokuskan pada CPO dan melupakan seperangkat permasalahan pada struktur industri hilirnya yakni minyak goreng.

Komoditi kelapa sawit yang dimulai tahun 1980 di Propinsi Riau telah mengalami kemajuan cukup pesat. Sampai tahun 2011 Riau memiliki kebun seluas 2.085.068 ha (tidak termasuk tanaman rusak) dengan produksi *Crude Palm Oil* (CPO) sebanyak 6.293.542 ton per tahun. Realisasi ekspor CPO mencapai 6,1 juta ton. Perkembangan industri pengolahan kelapa sawit sampai dengan tingkat CPO dan PKO sebanyak 146 unit dengan kapasitas 6.254 ton per jam, sedangkan industri hilir hanya terdapat 1 unit refinery, 1 unit pabrik minyak goreng dan tiga unit pabrik biodiesel dan jumlah tersebut terus berkembang. Potensi CPO yang besar tersebut jika diolah menjadi bahan pangan dan energi tentunya akan memberikan nilai tambah yang lebih besar untuk kesejahteraan petani dan kualitas hidup masyarakat di Propinsi Riau

Prospek pembangunan agroindustri kelapa sawit di daerah Riau masih sangat cerah. Untuk mewujudkan hal tersebut ada beberapa langkah yang perlu dilakukan. *Pertama*, meningkatkan produktivitas lahan perkebunan kelapa sawit; *Kedua*, membangun infrastruktur yang memadai dan harus terkait dengan unit pengolahannya; *Ketiga*, mengembangkan kegiatan penelitian dan pengembangan yang selama ini kurang terfokus; *Keempat*, menemukan teknologi baru untuk diversifikasi produk; dan *kelima*, harus ada deregulasi dalam industri kelapa sawit.

Kesimpulan

Pembangunan pertanian yang berbasis perkebunan bertujuan untuk meningkatkan kesejahteraan hidup masyarakat sehingga terjadi suatu

perubahan dalam pola hidup masyarakat di sekitarnya. Dari sisi lain keberhasilan pembangunan perkebunan yang berbasis agribisnis kelapa sawit diharapkan dapat mengurangi ketimpangan pendapatan antar golongan masyarakat maupun antar daerah.

Aktivitas kegiatan perkebunan kelapa sawit tersebut didukung oleh pabrik kelapa sawit (PKS) sebanyak 146 unit dengan kapasitas olah 6.254 ton per jam yang tersebar di berbagai kabupaten/kota di Propinsi Riau. PKS tersebut tidak menyebar secara merata, terpusat di kawasan perkebunan inti dan plasma. Sementara petani swadaya dengan lahannya yang menyebar terletak jauh dari PKS. Kondisi ini menyebabkan rendahnya mutu TBS sampai di pabrik. Usahatani perkebunan kelapa sawit di daerah Riau berkembang begitu pesatnya, namun tidak diimbangi oleh perkembangan pembangunan industri pengolah TBS yakni PKS. Kekurangan kapasitas olah PKS menyebabkan terjadinya penumpukan bahan baku di lokasi perkebunan.

Sampai tahun 2011 luas perkebunan kelapa sawit mencapai 2.103.175 ha dengan produksi TBS sebesar 36.809.252 ton. Sementara kapasitas olah pabrik kelapa sawit (PKS) hanya sebesar 30.019.200 ton. Kondisi tersebut menunjukkan daya dukung wilayah (DDW) sebesar 1,584. Seharusnya setiap TBS harus diolah dalam waktu kurang dari 8 jam atau DDW untuk PKS harus kecil dari 1 ($DDW < 1$). Daerah Riau masih kekurangan PKS sebanyak 16 unit dengan kapasitas olah 60 ton/jam atau identik dengan 21 unit PKS yang kapasitas 45 ton/jam. Kekurangan PKS tersebut berdampak terhadap harga dan pendapatan petani kelapa sawit. Dari sisi lain tingginya kebutuhan PKS di Daerah Riau merupakan peluang bisnis bagi investor untuk mengembangkan PKS dan industri produk turunan dari kelapa sawit.

Daftar Referensi

- Almasdi Syahza., 2003. Potensi Pembangunan Industri Minyak Goreng di Daerah Riau, dalam *Sosiohumaniora*, Vol 5 No 1, Maret 2003, Lembaga Penelitian Universitas Padjadjaran, Bandung.
- 2004. *Pemberdayaan Ekonomi Masyarakat Pedesaan Melalui Pengembangan Industri Hilir Berbasis Kelapa Sawit di Daerah Riau*, Disertasi, Pascasarjana Universitas Padjadjaran, Bandung.

- ., 2005. Dampak Pembangunan Perkebunan Kelapa Sawit Terhadap Multiplier Effect Ekonomi Pedesaan di Daerah Riau, dalam *Jurnal Ekonomi*, Th. X/03/November/2005, PPD&I Fakultas Ekonomi Universitas Tarumanagara, Jakarta.
- ., 2006. Studi Kelayakan Pengembangan Industri CPO dan Turunannya Di Kabupaten Bengkalis, Bappeda Kabupaten Bengkalis, Bengkalis
- ., 2007a. Model Pemberdayaan Masyarakat dalam Upaya Percepatan Pembangunan Ekonomi Pedesaan Berbasis Agribisnis di Daerah Riau, Penelitian Fundamental DP2M Direktorat Jenderal Pendidikan Tinggi Departemen Pendidikan Nasional, Jakarta.
- ., 2007b. Percepatan Pemberdayaan Ekonomi Masyarakat Pedesaan dengan Model Agroestate Berbasis Kelapa Sawit, dalam *Jurnal Ekonomi*, Th.XII/02/Juli/2007, PPD&I Fakultas Ekonomi Universitas Tarumanagara, Jakarta.
- ., 2008. Percepatan Pembangunan Ekonomi Pedesaan Melalui Pemberdayaan Koperasi Berbasis Agribisnis Di Daerah Riau, Penelitian Fundamental DP2M Direktorat Jenderal Pendidikan Tinggi Departemen Pendidikan Nasional, Jakarta.
- ., 2009a. Kelapa Sawit, Dampaknya Terhadap Percepatan Pembangunan Ekonomi Pedesaan di daerah Riau, Penelitian Hibah Kompetensi Tahun I, DP2M Direktorat Jenderal Pendidikan Tinggi Departemen Pendidikan Nasional, Jakarta.
- ., 2009b. Perumusan Model Pengetasan Kemiskinan Melalui Pemetaan Kelembagaan Ekonomi Berbasis Agribisnis di Kabupaten Indragiri Hilir Provinsi Riau, Penelitian Strategis Nasional DP2M Direktorat Jenderal Pendidikan Tinggi Departemen Pendidikan Nasional, Jakarta.
- ., 2010. Kelapa Sawit, Dampaknya Terhadap Percepatan Pembangunan Ekonomi Pedesaan di daerah Riau, Penelitian Hibah Kompetensi Tahun II, DP2M Direktorat Jenderal Pendidikan Tinggi Departemen Pendidikan Nasional, Jakarta.
- ., 2011. Kelapa Sawit, Dampaknya Terhadap Percepatan Pembangunan Ekonomi Pedesaan di daerah Riau, Penelitian Hibah Kompetensi Tahun III, DP2M Direktorat Jenderal Pendidikan Tinggi Departemen Pendidikan Nasional, Jakarta.
- Bustanul Arifin., 2001. *Spektrum Kebijakan Pertanian Indonesia*, Erlangga, Jakarta.
- Dinas Perkebunan Propinsi Riau, 2011. Statistik Perkebunan, Dinas Perkebunan Propinsi Riau, Pekanbaru.
- Gumbira Sa'id, E. dan L. Febriyanti. 2005. Prospek dan Tantangan Agribisnis Indonesia. *Economic Review Journal* 200. (On-line). www.bni.co.id/Document/16%2520Agribisnis.pdf , diakses 11 April 2012.
- Ginanjar Kartasasmita., 1996, Pembangunan untuk Rakyat, Memadukan Pertumbuhan dan Pemerataan, Cides, Jakarta.

- Mustari. K. dan Mapangaja B., 2005. Analisis Daya Dukung Lingkungan untuk Melaksanakan Pembangunan Berkelanjutan di Kabupaten Gowa, dalam *Jurnal Ecocelebica*, Vo. 1 No. 2, Januari 2005, hal 104-109.
- Riau Terkini, 2006, *Ke Depan Industri Sawit Menuju Industri Hilir*, <http://www.riauterkini.com/usaha.php?arr=9077>. diakses 12 Maret 2012.
- Otto Soemarwoto., 2001. *Atur Diri Sendiri. Paradigma Baru Pengelolaan Lingkungan Hidup*. Penerbit Gajah Mada University Press, Yogyakarta.
- Todaro, Michael P., 2006. *Pembangunan Ekonomi*, Terjemahan oleh Haris Munandar, Edisi kesembilan, Erlangga, Jakarta.
- Yuswar Zainal Basri., 2003, Pemberdayaan Ekonomi Masyarakat Pedesaan, dalam *Usahawan Indonesia* No 03/TH.XXXII Maret 2003, Lembaga Manajemen FE-UI, Jakarta.

Ucapan Terima Kasih

Penelitian Prioritas Nasional Masterplan Percepatan dan Perluasan Pembangunan Ekonomi Indonesia 2011-2025 (PENPRINAS MP3EI 2011-2025) ini didanai oleh Direktorat Jenderal Pendidikan Tinggi Kementerian Pendidikan Nasional tahun anggaran 2012. Penulis menyampaikan rasa terimakasih kepada Direktorat Penelitian dan Pengabdian pada Masyarakat melalui Lembaga Penelitian Universitas Riau yang telah memberikan kesempatan dan menyediakan dana untuk Penelitian MP3EI. Semoga hasil kerja ini bermanfaat bagi perkembangan ilmu dan kemajuan dunia pendidikan di Indonesia.